PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

Bali, 03 Maret 2025

Yth. 1.Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
2.Inspektur Daerah Provinsi Bali
di –
Denpasar

SURAT PENGANTAR
Nomor: B.24.000.8.6.3/1684/SEKRET/D.KOMINFOS

No.	Naskah Dinas / Barang Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	1 (satu) gabung	Dengan Hormat disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

diskominfos.baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan angayubagia kami haturkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha karena atas asung kertha wara nugraha-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Laporan ini menyajikan informasi tentang target dan pencapaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kinerja serta penilaian kinerja di tahun yang akan datang.

Bali, 24 Februari 2025
Kepala Dinas,

GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR i
D A F T A R I S I ii
BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali 2
1.3 Aspek Strategis 5
1.4 Landasan Hukum 6
1.5 Tujuan 10
1.6 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada 10
1.7 Sistematika Penyajian 13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA 14
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 14
2.2. Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali 25
3.2 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali 29
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 51
3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 54
3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali 63
BAB IV
PENUTUP 66
4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan 66
4.2 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja 66
4.3 Saran Dan Rekomendasi 68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah tuntutan global akan transparansi, efektivitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik, sistem akuntabilitas kinerja menjadi landasan penting bagi lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi publik. Sistem akuntabilitas kinerja mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas kinerja organisasi atau lembaga. Hal ini tidak hanya melibatkan pengukuran pencapaiantujuan dan sasaran, tetapi juga penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, sistem akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi alat untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Laporan kinerja yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah bentuk pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari tugas pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Laporan Kinerja juga merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat (1) point d.5. disebutkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang telah dianggarkan melalui APBD/P-APBD tahun 2024 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2024 s/d 2026.

1.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada Lampiran V disebutkan bahwa tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas

dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas, dan
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah terdiri dari 1 unit eselon II, 8 unit eselon III (terdiri dari 1 sekretariat, 5 bidang dan 2 UPTD) 1 unit eselon IV serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

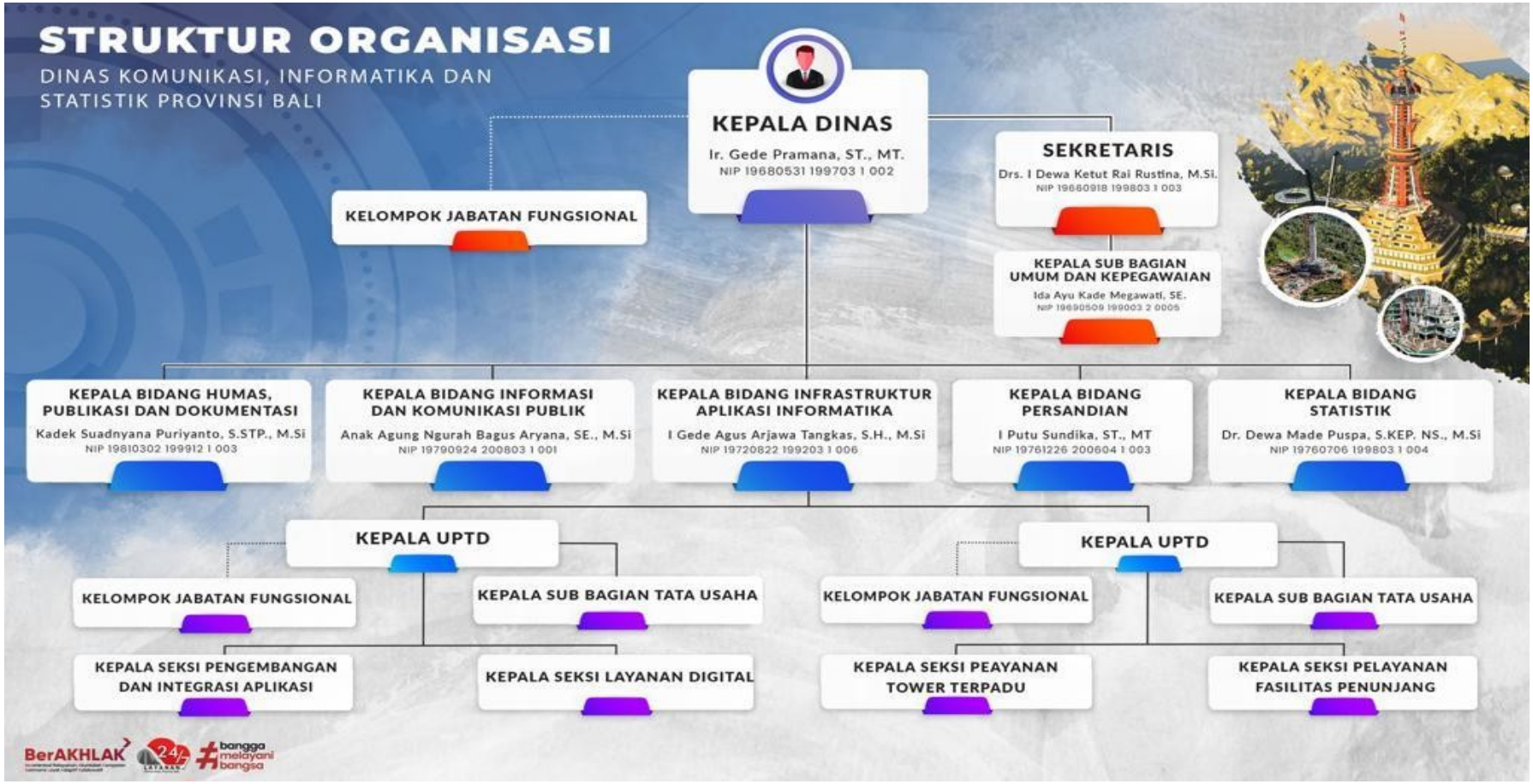
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
KEPALA DINAS
Ir. Gede Pramana, ST., MT.
NIP 19680531 199703 1 002
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si.
NIP 19680918 199803 1 003
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Ida Ayu Kade Megawati, SE.
NIP 19690509 199003 2 0005
KEPALA BIDANG HUMAS, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
Kadek Suadnyana Puriyanto, S.STP., M.Si
NIP 19810302 199912 1 003
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si
NIP 19790924 200803 1 001
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR APLIKASI INFORMATIKA
I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si
NIP 19720822 199203 1 006
KEPALA BIDANG PERSANDIAN
I Putu Sundika, ST., MT
NIP 19761226 200604 1 003
KEPALA BIDANG STATISTIK
Dr. Dewa Made Puspa, S.KEP. NS., M.Si
NIP 19760706 199803 1 004
KEPALA UPTD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI APLIKASI
KEPALA SEKSI LAYANAN DIGITAL
KEPALA UPTD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PEAYANAN TOWER TERPADU
KEPALA SEKSI PELAYANAN FASILITAS PENUNJANG
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

1.3 Aspek Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pembangunan dan pemerintahan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai fungsi yakni sebagai penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di daerah Bali.

Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah pada era digital saat ini adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan serta masifnya penyebaran berita bohong/ ujaran kebencian oleh masyarakat. Permasalahan utama tersebut bila ditinjau dari berbagai aspek dapat dipetakan dalam isu strategis sebagai berikut:

3) Belum maksimalnya penyebarluasan informasi program dan kebijakan pemerintah;
4) Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat;
5) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik;

6) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;dan
7) Rendahnya pengamanan data dan informasi pemerintah

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
   a. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak;
   b. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasidan Komunikasi);
   c. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
   d. Pengendalian bandwith dan pendistribusian ke Perangkat Daerah
   e. Pengelolaan dan Pengembangan Data Center
3. Meningkatkan kualitas keamanan data dan informasi pemerintah;
4. Meningkatkan Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2024 disusun dengan landasan hukum:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
n. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
o. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
p. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
s. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
t. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5;
u. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
v. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
w. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.5 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selama tahun 2024. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada

1) Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebanyak 247 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	121 orang	(44,81%)
2	Non ASN	149 orang	(55,19%)
	Jumlah	**270 orang**	**(100%)**

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	43 orang	(35,53%)
2	Jabatan Fungsional	78 orang	
	Pranata Humas Ahli Muda	5 orang	(4,13%)
	Pranata Humas Ahli Pertama	17 orang	(14,05%)
	Pranata Komputer Ahli Pertama	48 orang	(39,66%)
	Pranata Humas Ahli Madya	1 orang	(0,83%)
	Sandiman Ahli Muda	1 orang	(0,83%)
	Sandiman Ahli Pertama	1 orang	(0,83%)
	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1 orang	(0,83%)
	Statistisi Ahli Muda	1 orang	(0,83%)
	Arsiparis Ahli Muda	1 orang	(0,83%)
	Penerjemah Ahli Madya	2 orang	(1,65%)
	Jumlah	**121 orang**	**(100%)**

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(2,33%)
2	Eselon III.a	5 orang	(11,63%)
3	Eselon III.b	2 orang	(4,65%)
4	Eselon IV.a	7 orang	(16,28%)
5	PNS Pelaksana	28 orang	(65,11%)
	Jumlah	**43 orang**	**(100%)**

2) Sarana dan Prasarana

Jumlah aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	***Golongan Tanah meliputi :***			
	a. Tanah	14	Bidang	
2.	***Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :***			
	a. Peralatan Komputer	1.654	Buah	
	b. Alat-alat angkutan	30	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Buah	
	d. Alat kantor danrumah tangga	1.197	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan komunikasi	336	Buah	Alat-alat studio
3.	***Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :***			
	a. Bangunan gedung	16	Buah	Gedung perkantoran dan monumen
4.	***Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :***			
	a. Instalasi	-	Buah	
	b. Jaringan	1	Buah	Jaringan telepon
5.	***Golongan Aset Tetap Lainnya meliputi :***			
	a. Buku dan perpustakaan	20	Paket	Judul buku yang ada diperpustakaan
	b. Barang dan corak kebudayaan	3	Buah	Pahatan kayu
6.	c. ***Golongan Aset Lainnya meliputi :***			
	a. Lisensi	9	Buah	

1.7 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selama tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta struktur organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2024 meliputi RPJMD Provinsi Bali.

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, menguraikan pengukuran kinerja 2024, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A. Visi

VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU Mengandung makna "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Skala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalamKebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945".

B. Misi

Visi: "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana memiliki 22 misi, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengemban misi ke 22 yaitu Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah.

C. Tujuan dan Sasaran

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mewujudkan tujuan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Bali 2024-2026 yang menetapkan dua tujuan yaitu:

1. Tujuan 5 RPD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

Indikator tujuan	:	Indeks Infrastruktur
Sasaran Pemerintah Daerah	:	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Indikator Sasaran	:	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sasaran Perangkat Daerah	:	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien
Indikator Sasaran	:	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Tujuan 6 RPD : Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan.

Indikator tujuan	:	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Sasaran Pemerintah Daerah	:	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat.
Indikator Sasaran	:	Indeks demokrasi
Sasaran Perangkat Daerah	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi
Indikator Sasaran	:	Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan pada Renstra 2024- 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke		
					1	2	3			1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	3,4	3,6	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00	93,10	95,20
2	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	Indeks keterbukaan informasi publik	93,50	93,55	93,60	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	93,40	94,10	94,80

D. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukurkeberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2024-2026. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	Nilai Penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai Indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Domain dan Aspek Penilaian: Domain 1: Kebijakan Internal SPBE dengan total bobot 17% Domain 2: Tata Kelola SPBE dengan total bobot 28% Domain 3: Layanan SPBE dengan total bobot 55%	Kementeria PAN RB	Kementeria PAN RB	Indeks SPBE tersebut didukung oleh tiga sasaran strategis pada tiga urusan yang diemban (Komunikasi, informatika, statistik dan persandian)
Meningkatnya	Persentase	Komposit dari realisasi penyebaran	Dinas Komunikasi,	Dinas	Program Pengelolaan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
informasi publik yang disebarluaskan	informasi yang disebarluaskan	informasi melalui media, PPID dan Literasi Digital dikali 100%	Informatika dan Statistik	Komunikasi, Informatika dan Statistik	Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi infromatika	Persentase layanan teknologi informatika	Komposit dari realisasi pengelolaan pusat data pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem komunikasi intra dan jumlah aplikasi yang dikembangkan dikali 100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Meningkatnya kualitas keamanan informasi pemerintah	Indeks Evalaksan	Nilai evaluasi pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah yang meliputi area: - Profil Instansi Penyelenggara - Profil Khusus - Kebijakan - Pengelolaan Sumber Daya - Pengamanan Sistem elektronik dan infromasi non elektronik - Layanan Keamanan Informasi - Pola Hubungan Komunikasi Sandi	BSSN	BSSN	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Meningkatnya ketersediaan data	Indeks Pembangunan	Nilai yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan SDI	BPS	BPS	Program Penyelenggara Statistik Sektoral

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
statistik sektoral yang berkualitas	Statistik	dan Statistik Sektoral yang pengukurannya meliputi 38 Indikator yang terbagi dalam 5 (lima) Domain yaitu: Prinsip Satu Data Indonesia (SDI), Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional			
Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Ukuran pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

E. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Yang Ditetapkan Dalam Rencana Kerja 2024

Tujuan, Sasaran/program yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Indeks**	**3,2**
			Persentase Layanan Teknologi Informatika	Persen	91
			- Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan Intranet, Internet dan Aplikasi	Persen	100
			Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	4,0
			- Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	Sekor	11
			Indeks Evalaksan	Indeks	75
			- Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	OPD	29
			- Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	OPD	29
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,75
			- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	Dokumen	16
			- Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	Dokumen	75
			- Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Bulan	12
			- Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Paket	3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			- Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Bulan	12
			- Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	Unit	674
2	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	Indeks	93,50
			Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	Persen	93,40
			- Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	Indeks	82

F. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4 Lampiran Perjanjian Kinerja

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi	19,452,310,914.00	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik	12,825,481,160.00	APBD
3	Program PengelolaanAplikasi Informatika	142,552,665,434.00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	416,841,540.00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	466,431,780.00	APBD
	TOTAL	175,713,730,828.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya informasi publik yang disebarluaskan	Persentase informasi yang disebarluaskan	93,40 Persen
2	Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika	Persentase layanan teknologi informatika	91,00 Persen
3	Meningkatnya kualitas keamanan informasi pemerintah	Indeks Evalaksan	75 Indeks
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	4,00 Indeks
5	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75 Nilai Angka

2.2. Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
   1. Perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. Melalui program dan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata pemanfaatan media secara sehat serta mampu melinduni hak masyarakat maupun lembaga pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan informasi.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Melalui program/kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan layanan infrastruktur TIK dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan sehingga dapat menciptakan kelancaran pelaksanaan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SMA/SMK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi. Program ini bertujuan untuk melakukan pencatatan data dan informasi yang terstruktur yang akan mendukung proses

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Programini menjadi dasar untuk melakukan penyusunan analisa statistik sektoral yang mencakup 11 sektor yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM, yang akan dipublikasi secara luas.

e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan 2 (dua) kegiatan yakni Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi. Program/kegiatan ini memberikan standarisasi keamanan data, sehingga informasi pelaksanaan administrasi perkantoran bisa terlaksana secara lancar. Hal ini dilandaskan pada tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali atas keamanan data dan informasi yang penting.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan program kegiatan di tahun 2024 maka Laporan Kinerja tahun 2024 membahas tentang pencapaian hasil-hasil berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Untuk mengetahui hasil yang diperoleh maka dilakukan pengukuran kinerja sehingga dapat dinilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Diskominfos Prov. Bali

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja								
No.	**Tujuan/Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Tahun 2023**			**Tahun 2024**		
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1	MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DARAT, LAUT DAN UDARA SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI							
	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	4,07	135,67	3,2	4,3	134,38
2	MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN KRAMA BALI DAN WISATAWAN							
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,2	94,32	101,20	93,5	98,02	104,83

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,72	2,18	2,52	3	3,2	1,72	3,68	3,68	4,07	4,3
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74	92,50	93	93,20	93,50	85,87	93,62	97,72	94,32	98,02

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DARAT, LAUT DAN UDARA SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI				
	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE)	4,3	3,6	119,44
2	MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN KRAMA BALI DAN WISATAWAN				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	Indeks KeterbukaanInformasi Publik	98,02	93,60	104,72

3.2 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali

Pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal walaupun adanya kebijakan efisiensi Tujuan Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan indeks sebesar 3,2. Pada tahun 2023 target indeks SPBE sebesar 3 dan terealisasi jauh melampaui target yaitu sebesar 4,07. Target yang ditetapkan tahun 2024 sesuai Renstra tahun 2024-2026 yaitu sebesar 3,2 telah tercapai bahkan melampaui target dengan nilai 4,30. Pada pemeringkatan nilai, indeks 4,30 termasuk peringkat dengan kategori memuaskan karena berada di level 4,2 – 5,0. Kategori indeks SPBE sesuai ketentuan disajikan sesuai tabel berikut:

Tabel 3.4 Kategori indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 - 5	Memuaskan
2	3,5 -< 4,2	Sangat Baik
3	2,6 -< 3,5	Baik
4	1,8 -< 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut tidak terlepas dari peranan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan utamanya lancarnya pelaksanaan program-program pendukung dan prioritas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Pelaksanaan program diuraikan sbb:

1. Program pengelolaan aplikasi informatika

Diwujudkan dengan kegiatan:

a) Pelayanan Jaringan Internet dan Intranet

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki perangkat jaringan internet terintegrasi untuk menyediakan layanan akses internet untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* dalam bidang Teknologi Informasi maka dibutuhkan konektivitas yang tinggi dan layanan internet untuk menunjang kinerja pegawai. Pada tahun 2024 pengadaan layanan internet IP transit internasional pada Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 4 Gbps dan digunakan untuk pelayanan internet yang terintegrasi untuk seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali.

Selain layanan internet kepada Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga memberikan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se-Bali. Besar bandwidth yang dialokasikan untuk setiap titik adalah sebesar 50 mbps. Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN sesuai tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN

No	Kab./Kota	Jumlah			
		SMA	SMK	SLB	Total
1	Jembrana	7	5	1	13
2	Tabanan	9	3	1	13
3	Badung	13	4	1	18
4	Gianyar	9	8	1	18
5	Klungkung	6	2	1	9
6	Bangli	5	9	1	15
7	Karangasem	10	6	1	17
8	Buleleng	17	14	2	33
9	Denpasar	14	7	3	24
Jumlah		**90**	**58**	**12**	**160**

b) Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

lebih efektif, efisien, transparan, serta responsif. Pengelolaan dan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali melalui UPTD Pengambangan dan Integrasi Layanan Digital. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Roadmap SPBE Provinsi Bali dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali.

Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dari periode 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 62 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun daftar aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah sesuai tabel berikut.

Tabel 3.6 Daftar Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
1	Sistem Monitoring Kemiskinan dan Stunting (SiGenting)	https://sigenting.baliprov.go.id
2	Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA)	https://sigapura.baliprov.go.id
3	Sistem Perizinan Elektronik (PRESTISE)	https://prestise.baliprov.go.id
4	Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana (PIKBS)	https://invest.baliprov.go.id
5	Sistem Informasi, Pendataan dan Penyelenggaraan Pungutan Bagi Wisatawan Asing (LOVE BALI)	Website : https://lovebali.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/lovebali-playstore App Store : https://balikom.info/lovebali-appstore
6	Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT)	https://sikuat.baliprov.go.id
7	Kantor Virtual	Website : https://kanal.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/kanal-playstore App Store : https://balikom.info/kanal-appstore
8	Kantor Virtual Publik	https://kanal.baliprov.go.id

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
9	Sistem Layanan Kepegawaian (SIMPEG)	https://simpeg.baliprov.go.id
10	Sistem Absensi berbasis Pengenalan Wajah dan Lokasi	Website : https://hadir-app.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore App Store : https://balikom.info/hadir-appstore
11	Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online (SIKEPO)	https://sikepo.baliprov.go.id
12	Sistem Antrean Layanan Publik	Website : https://antrean.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/antrean-playstore App Store : https://balikom.info/antrean-appstore
13	Bali Media Centre (BMC) : Portal Berita, Survei, Konsultasi/HelpDesk, Kontak dan Informasi Publik lainnya	Website : https://bmc.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/bmc-playstore App Store : https://balikom.info/bmc-appstore
14	Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	https://sisnaker.baliprov.go.id
15	Sistem Pelayanan Perikanan (SIMPELKAN)	https://simpelkan.baliprov.go.id
16	Layanan Bali Digital Festival	https://digifest.baliprov.go.id
17	Sistem Penyelenggaraan Event (EVENTID) : Registrasi, Absensi, Piagam Elektronik	Website : https://undangan.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/undangan-playstore App Store : https://balikom.info/undangan-appstore
18	Virtual Reality (VR) Pura Pulaki	https://var.baliprov.go.id/
19	Virtual Reality (VR) Gamelan Tradisional Rindik, Kecek, dll	https://var.baliprov.go.id/
20	Virtual Reality (VR) Nyomia Bhutakala	https://var.baliprov.go.id/
21	Virtual Tour 360 Experience	https://virtualtour360.baliprov.go.id/
22	Augmented Reality (AR) Daerah Tujuan Wisata	https://var.baliprov.go.id/
23	Augmented Reality (AR) Instagram Filter Bali Era Baru	https://var.baliprov.go.id/link-tree

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
24	Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali	Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore
25	Smart Dashboard”	https://smart.baliprov.go.id/
26	Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota	https://datasektoral.baliprov.go.id/
27	Sistem Pengelolaan Data (CERAKEN) Kebudayaan Bali	https://ceraken.baliprov.go.id/
28	Bali Knowledge Based System (INSIGHT)	https://insight.baliprov.go.id/
29	Sistem Single Sign On (SSO)	https://sso.baliprov.go.id
30	Sistem Manajemen Talenta (SIMATA)	https://simata.baliprov.go.id/
31	Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali	Website : https://aset.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/aset-playstore App Store : https://balikom.info/aset-appstore
32	Sistem Perpustakaan Digital “Pustaka Bali”	https://esakip.baliprov.go.id/
33	Sistem Strategi Penguatan Manajemen Resiko Berkualitas (SUPERMANKUAT)	https://supermankuat.baliprov.go.id/
34	Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (PETIEMAS)	https://petiemas.baliprov.go.id
35	Layanan Smartlink	https://www.balikom.info/
36	Sistem Notifikasi Terintegrasi	https://notifikasi.baliprov.go.id/
37	Sistem Pendataan Koperasi (Online Data Koperasi)	https://koperasi.baliprov.go.id/
38	Sistem pendataan IKM dan UMKM	https://officeumkm.baliprov.go.id/
39	Marketplace bagi Produk Koperasi, UMKM dan IKM Bali (Made in Bali)	Website : https://madeinbali.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/madeinbali-playstore
40	Integrasi Pembayaran Layanan Aplikasi/ One Payment	https://sipay.baliprov.go.id/

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
	Gateway (SiPAY)	
41	Pameran Virtual Pembangunan Bali	https://pameran.baliprov.go.id/
42	Permohonan Informasi Publik dalam Portal Bali Satu Data	Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore
43	Sistem Perpustakaan Digital (Pustaka Bali)	https://pustakabali.baliprov.go.id/
44	Kelas Virtual	Website : https://kelasvirtual.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/kelasvirtual-playstore App Store : https://balikom.info/kelasvirtual-appstore
45	Website Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno	https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/
46	Layanan Pemanfaatan Aset	Website : https://aset.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/siwa-playstore App Store : https://balikom.info/siwa-appstore
47	Layanan Bug Bounty	https://bugbounty.baliprov.go.id/
48	Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)	https://jidhat.baliprov.go.id/
49	Sistem Sensus Desa Adat	https://sensusadat.baliprov.go.id/
50	Sistem Informasi Krama Desa Adat (KRAMA)	https://krama.baliprov.go.id/login
51	Sistem Manajemen Aset Desa Adat (PADRUWEN)	https://aset.baliprov.go.id/
52	Sistem Manajemen Lembaga Usaha Milik Desa Adat (BUPDA)	https://aset.baliprov.go.id/
53	Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK-KBS)	Website : https://sik-kbs.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/sik-kbs-playstore App Store : https://balikom.info/sik-

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
		kbs-appstore
54	Sistem Inventori (SIRI)	https://siri.baliprov.go.id/
55	Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan	https://labkes.baliprov.go.id/
56	Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan (SILEBAH)	https://silebah.baliprov.go.id/
57	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali	Website : https://jdih.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/jdihprovbali-playstore App Store : https://balikom.info/jdihprovbali-appstore
58	Whistleblower System (WBS) Pemprov Bali	https://wbs.baliprov.go.id/
59	Website Turyapada	https://turyapada.baliprov.go.id/
60	SIAP SWASTISABA	https://swastisaba.baliprov.go.id/
61	Sistem Informasi Layanan Cuti Terintegrasi (SILACI)	Website : https://hadir-app.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore App Store : https://balikom.info/hadir-appstore
62	Sistem Pengawasan dan Pelaporan Terintegrasi E-KTTP (SIWALATRI E-KTPP)	Website : https://siwalatri.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/AndroidApp App Store : https://balikom.info/IOsApp

c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Dengan Dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, peran teknologi informasi kini menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah. Pusat data menjadi komponen yang sangat penting dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisis data secara efektif. Sebagai tulang punggung infrastruktur teknologi informasi, pusat data bukan hanya sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai katalisator

dalam transformasi digital yang memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat ini mengelola Pusat Data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi serta pusat penyaluran akses internet ke seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. Pusat Data ini juga menyediakan layanan komputasi private cloud untuk Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Layanan komputasi yang saat ini digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) berupa layanan virtual machine yang digunakan untuk menempatkan data, aplikasi, dan website. Private cloud ini dibangun di atas perangkat keras HP Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 11 (sebelas) unit, dengan total kapasitas terpasang sebagai berikut:

- vCPU: 128 core (alokasi minus, namun tidak digunakan secara penuh)
- Memori: 768 GB (tersisa 300 GB)
- Storage: 22 TB (tersisa 4 TB)
- Bandwidth: 4 Gbps

Namun, saat ini Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki backup server, sehingga apabila terjadi down pada pusat data, aplikasi tidak bisa diakses oleh publik. Selain itu, Pusat Data ini juga belum sepenuhnya memenuhi standar Pusat Data Nasional sebagaimana amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (2). Dalam rangka menjaga agar pusat data dapat berfungsi optimal dan untuk mencegah gangguan, pada tahun 2024 dilakukan kegiatan pemeliharaan berupa penggantian peralatan/komponen server serta pemeliharaan genset untuk memastikan kestabilan cadangan daya listrik apabila terjadi pemadaman dari PLN.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perangkat server yang saat ini digunakan sudah mulai berusia tua dan tidak lagi dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Perangkat keras yang sudah diskontinu ini

semakin sulit untuk diupgrade, dan kesulitan dalam pembaruan software juga mulai terlihat. Untuk mendukung digitalisasi birokrasi dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi, serta memastikan kelangsungan operasional Pusat Data dalam jangka panjang, pada tahun 2025 direncanakan untuk menambahkan server baru yang lebih sesuai dengan standar terkini. Penambahan server baru ini akan meningkatkan kapasitas penyimpanan, komputasi, serta memberikan dukungan untuk layanan cloud server bagi Perangkat Daerah yang lebih efisien dan handal.

Selain itu, untuk memaksimalkan kerja dan memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah, diperlukan perangkat pendukung yang lebih modern, seperti personal komputer yang dapat bekerja selama 24 jam untuk memantau dan mengelola server Pusat Data secara lebih optimal. Penambahan server baru ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pusat Data tetap berfungsi dengan baik, dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat, serta mendukung efisiensi operasional Pemerintah Provinsi Bali.

d) Pembangunan Lanjutan Taman Teknologi Komunikasi "Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali"

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi ini dilakukan untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi "Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali" diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru. Pembangunan Taman Teknologi "Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali" untuk tahap awal sudah selesai dilaksanakan. Untuk tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pendukung antara lain:

1. Planetarium Tower Turyapada;
2. Pusat Kendali Operasional Tower Turyapada;

3. Restoran Outdoor;
4. Area komunal & Lobby komunal, Lobby Glamping, dan Wahana Outbond
5. Dinding Penahan Tanah (DPT), Landscape Kawasan Turyapada Tower, Pagar BRC dan Tembok Beton;
6. Penataan Areal Parkir;
7. Jalan Akses dari Jalan Utama menuju Areal Parkir Turyapada Tower dan Jalan Lingkar Selatan Turyapada Tower;
8. Bangunan Tempat Suci;
9. Mess Pegawai Tower Turyapada; dan
10. Tempat Pengelolaan Sampah Kawasan Turyapada Tower.

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dilakukan kerjasama dengan LPPM Universitas Udayana melalui pekerjaan Swakelola Manajemen Konstruksi. Swakelola Manajemen Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi bertujuan antara lain:

i. Dapat dicapai hasil perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik Taman Teknologi Komunikasi yang sesuai dengan dokumen kontrak baik dari sisi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah ditentukan; dan
ii. Terwujudnya sistem manajerial (Manajemen Konstruksi) yang terkoordinasi antar disiplin ilmu didalam proses pembangunan konstruksi fisik, baik dalam proses pelaksanaan fisik konstruksi serta proses masa pemeliharaan melalui proses penerapan fungsi-fungsi Manajemen Konstruksi dan penempatan personil-personil yang sesuai dalam pelaksanaannya.

e) Layanan BKK Wifi Gratis

Pada tahun 2024 layanan BKK Wifi Gratis bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas pada 2.118 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur

terintegrasi serta terkonektivitas antar-wilayah. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sesuai tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Data Layanan BKK Free Wifi

NO	KAB./KOTA	Lokasi Pemasangan				Jumlah Titik Wifi
		Desa Adat	Puskesmas	Fasilitas Umum	Objek Wisata	
1	JEMBRANA	64	10	36	13	123
2	TABANAN	349	20	106	24	499
3	GIANYAR	273	81	99	28	481
4	KLUNGKUNG	122	9	27	3	161
5	BANGLI	172	12	38	39	261
6	KARANGASEM	143	12	13	53	221
7	BULELENG	169	19	66	43	297
8	DENPASAR	35	21	17	2	75
9	BADUNG	Dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung				
JUMLAH		**1,327**	**184**	**402**	**205**	**2,118**

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Program-program kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah tentu harus tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media luar ruang dan media online. Guna mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintah, media massa dan stakeholder lainnya serta mengoptimalkan penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah, maka berbagai upaya telah ditempuh sebagai berikut:

a) Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Televisi, Radio, Media Online, Media Sosial dan Konten Kreatif.

Fokus dan sasaran publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Bali bukan hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga pada para praktisi jurnalistik di media massa. Hal ini mengingat semakin derasnya arus informasi yang memenuhi ruang-ruang publik. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin banyak dan beragam. Di sinilah pentingnya menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi yang bersumber dari media baik cetak, elektronik, maupun online dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar. Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kerjasama dengan 18 Media Cetak, 32 Media Online, 4 Media Televisi dan 34 Media Radio. Kegiatan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial Pemerintah Provinsi Bali dan konten-konten kreatif berupa iklan radio/TV, tayangan sosialisasi maupun media luar ruang seperti spanduk, banner, backdrop, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan kegiatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Berkembangnya era digital saat ini, menuntut pemerintah daerah untuk mencari cara-cara menarik dalam mengemas informasi agar informasi-informasi khususnya mengenai program-program dan kebijakan pemerintah

lebih menarik, mudah dipahami, relevan dan lebih cepat sampai ke Masyarakat.

b) Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi publik dilaksanakan dalam rangka penyampaian program-program pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus masyarakat dapat memantau, mengawasi program-program tersebut. Pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yakni secara offline (tatap muka langsung) dan online melalui alamat *website* https://diskominfos.baliprov.go.id dan melalui *email* diskominfos@baliprov.go.id. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah Provinsi Bali menindaklanjuti implementasi dari Undang-Undang tersebut, dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi serta menetapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris di OPD sebagai PPID Pelaksana.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PPID, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah melakukan rapat koordinasi dengan PPID Pelaksana secara rutin dan juga menyelenggarakan bimbingan teknis singkat terkait dengan keterbukaan informasi dari berbagai narasumber.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan Kolaborasi Bali Digifest yang bertempat di Ardha

Candra, Taman Budaya (Art Center) Bali. Bali Digital Festival yang berisi konferensi, pameran, dan exhibition ini diselenggarakan, bukan hanya untuk menjadi ajang penyampaian gagasan dan ide, namun yang lebih penting daripada itu, harus dilihat sebagai bagian dari langkah-langkah taktis Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya membangun ekosistem Digital Berkelanjutan, untuk mewujudkan Transformasi Digital yang bersifat integratif dan kolaboratif. Namun perlu diingat dan dicatat, bahwa apapun bentuk pembangunan Bali termasuk Pembangunan di bidang digital harus tetap menjaga, menghormati, dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada 3 (tiga) fundamental pembangunan Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali, dan Budaya Bali, untuk mewujudkan Bali yang berkualitas dan Bali berkelanjutan.

c) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, melalui: Literasi Informasi dan media sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Kegiatan penguatan pengelolaan opini publik dan isu publik pada tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta pemantauan isu-isu publik di media massa, media online dan media sosial. Output yang dihasilkan berupa analisa isu dan berita yang menghasilkan rekomendasi terkait strategi komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai bahan masukan untuk tindak lanjut maupun perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- Kegiatan fasilitasi terhadap Komisi Informasi Provinsi Bali yang dilakukan sepanjang tahun melalui dukungan administratif, kelembagaan dan keuangan. Dukungan administratif untuk membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari khususnya penyelesaian sidang sengketa informasi. Dukungan kelembagaan dalam bentuk kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Dukungan keuangan diberikan dalam bentuk ketersediaan anggaran melalui DPA pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Pada tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Bali

menyelenggarakan 2 kali sidang sengketa informasi dengan hasil 1 putusan dan 1 mediasi.

d) Pelaksanaan Literasi Digital

Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2024 dilaksanakan dengan berkolaborasi dan melibatkan komunitas maupun Lembaga Masyarakat yang aktif bergerak dibidang penanganan HOAX serta Literasi Digital seperti RTIK Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali.

I. Pelaksanaan Literasi Digital Melalui Tatap Muka

Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2024 melalui tatap muka dilaksanakan sebagai berikut :

- Sasaran peserta ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Tema dari Literasi Digital dengan target sasaran ASN adalah "ASN Tangkal HOAX melalui Cek Fakta". Pelaksanaan Literasi Digital "ASN Tangkal HOAX melalui Cek Fakta" ini bertujuan agar ASN memiliki pemahaman tentang cek fakta dan memiliki kemampuan dasar dalam cek fakta. Selain itu juga mendorong ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mampu memanfaatkan media social secara bijak sesuai dengan kode etik kepegawaian dan peraturan lainnya serta sebesar-besarnya dipergunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait program Pembangunan.
- Sasaran peserta Masyarakat Umum, KIM dan UMKM

  Dalam rangka menumbuhkan Netizen Cakap Digital dilaksanakan dengan topik "Memanfaatkan Media Sosial untuk Menambah Penghasilan". Topik ini dalam rangka mengembangkan kemampuan *entrepreneur* masyarakat dan menumbuhkan perekonomian digital melalui pemanfaatan media sosial.
- Sasaran Masyarakat Umum, Pelajar, ASN

  Di bidang keamanan digital dilaksanakan untuk mengantipasi berbagai Tindakan kejahatan online antara lain Investasi Bodong dan Judi Online dengan tema " Mewaspadai Bahaya Pinjol dan Judi Online

di Media Sosial"

II. Pelaksanaan Literasi Digital melalui Media Sosial

Pelaksanaan Literasi Digital melalui media sosial dilaksanakan melalui beberapa *platform* yakni Instagram, Facebook dan Youtube, dengan nama akun yang sama yaitu **@opinipublik12**. Pelaksanaan Literasi Digital melalui media sosial utamanya Instagram **@opinipublik12** diharapkan mampu menjangkau lebih banyak peserta melalui unggahan konten-konten baik berupa ilustrasi, foto, reel maupun infograpik terkait literasi digital.

III. Pelaksanaan Literasi Digital pada Pameran Pembangunan

Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2024 juga dilaksanakan dengan memanfaatkan event atau kegiatan Pameran Pembangunan. Sebagain wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, Pameran Pembangunan merupakan sarana efektif untuk mensosialisasikan Literasi Digital. Selain itu Pameran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 di laksanakan dengan berkolaborasi dan bersamaan dengan kegiatan Bali Digifest yang merupakan pameran terkait pelaksanaan tugas pemerintah di bidang digital, sekaligus sarana pengembangan ekosistem digital untuk Masyarakat Bali. Literasi Digital pada Pameran Pembangunan ditampilkan melalui kegiatan "Pojok Literasi Digital." Pada Pojok Literasi Digital, ditampilkan berbagai informasi terkait 4 pilar Literasi Digital yaitu Digital Ethic, Digital Culture, Digital Skill dan Digital Safety melalui penayangan video pendek hasil lomba Literasi Digital, permainan dan talkshow.Talkshow menghadirkan narasumber dari penggiat-penggiat Literasi Digital di Bali antara lain MAFINDO Wilayah Bali, RTIK Provinsi Bali, OJK, dan instansi/Lembaga yang berkepentingan terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

IV. Pelaksanaan Literasi Digital melalui Kolaborasi Stakeholder

Selain melaksanakan Literasi Digital melalui kegiatan tatap muka pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, penayangan

konten Instagram, Pojok Literasi Digital pada Pameran Pembangunan dan juga dilaksanakan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti RTIK Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali. Kolaborasi diberikan melalui dukungan fasilitasi untuk Literasi Digital yang dilakukan baik oleh RTIK Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali.

e) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Selama tahun 2024 kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

I. Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya.

II. Pelaksanaan Forum Kehumasan Provinsi Bali diawali dengan pengumpulan data-data tentang isu-isu aktual dimasyarakat, dilanjutkan dengan analisis isu-isu, alternatif pemecahan masalah, dilanjutkan dengan sosialisasi pemecahan masalah melalui forum kehumasan

3. Program Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Urusan Persandian di Pemerintah Daerah merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun layanan yang perlu dilakukan sesuai kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian adalah melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menyelenggarakan urusan persandian yang meliputi aspek kerahasian, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Bidang Persandian pada tahun 2023 melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan Analisa kebutuhan SDM persandian (Jabatan Fungsional Sandiman) dan Analisa kebutuhan sumber daya keamanan informasi lainnya serta pengelolaan SDM Persandian untuk peningkatan kompetensi melalui

pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan BSSN atau pihak lain yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang berhubungan dengan pelaksanaan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan tahun 2023 yakni melalui Lentera Siber dengan konsep melibatkan peserta secara langsung berinteraksi serta menjadikan peserta sebagai target serangan siber dengan harapan lebih tertanam kesadaran keamanan informasi/siber. Selanjutnya dalam mencegah infeksi *malware* di perangkat (komputer dan laptop) aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta untuk memudahkan monitoring keamanan perangkat dari *malware*, dilaksanakan pengadaan *antivirus* terpusat (*TrendMicro*)

b) Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Menyelenggarakan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan cyber yang bertujuan mengamankan informasi elektronik. CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan usaha-usaha untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah Sistem Elektronik ke kondisi normal. Pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diresmikan Baliprov-CSIRT dengan anggota CSIRT adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

c) Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan Jammer yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi. Tahun 2023 kegiatan ini dilakukan dengan melakukan fasilitasi kegiatan pengacakan sinyal (jammer) pada saat kunjungan kepala negara.

d) Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Sertifikat Elektronik (SE) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan identitas yang menunjukkan

status subyek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Sampai dengan saat ini pemegang Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah adalah Sekretaris Daerah, Eselon II, KaUPTD, Sekretaris, Pejabat Keuangan yang menangani dana dekon dan Ka SMAN, SMKN dan SLBN di lingkup Pemprov Bali. Pemberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan salah satu upaya untuk mengamankan informasi elektronik.

e) IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari. Aplikasi yang dilakukan untuk melakukan pengujian antara lain: *Kali Linux, OWASP ZAP, BurpSuite dan Pentest Tool*. Sebelumnya VA/ITSA dilakukan oleh BSSN dengan kuota 3 aplikasi per Tahun. Sejak tahun 2023 kegiatan VA/ITSA sudah dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

f) Pengelolaan *Secure Email* SANAPATI dan *Selection*

Pengelolaan *email* SANAPATI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 41/03-E/HK/2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana E-Mail Sanapati pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. *Email* SANAPATI adalah surat elektronik (*email*) yang menggunakan jalur komunikasi tertutup dan memiliki proteksi terhadap *spam, fake mail, phising dan email bombing*. *Email* SANAPATI digunakan sebagai media kirim terima informasi yang aman dalam kerangka Jaring Komunikasi Sandi internal dan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan *SELECTION (Secure File Encryption)* merupakan *tool* untuk *enkripsi/dekripsi file* yang berbasis sistem operasi *windows* dan memiliki fitur autentikasi lisensi mandiri serta penerapan aspek kriptografis pada fitur keamanannya.

4. Program Penyelengaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data.

Analisa singkat terhadap keberhasilan target disajikan padatabel berikut.

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**3,2 Indeks**	**4,3 Indeks**	134,38 %	Target Terlampaui	
		Persentase Layanan Teknologi Informatika	91 Persen	91 Persen	100%	Target Tercapai	
		- Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan Intranet, Internet dan Aplikasi	100 Persen	100 Persen	100%	Target Tercapai	

		Indeks Pembangunan Statistik	4,0 Indeks	3,37 Indeks	84,25%	Target Tidak Tercapai	
		- Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 Sekor	11 Sekor	100%	Target Tercapai	
		Indeks Evalaksan	75 Indeks	89,52 Indeks	119,36 %	Target Terlampaui	
		- Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	29 OPD	100%	Target Tercapai	
		- Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD	29 OPD	100%	Target Tercapai	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75 Nilai	84,61 Nilai	102,25 %	Target Terlampaui	
		- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	Target Tercapai	
		- Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	Target Tercapai	
		- Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	Target Tercapai	

		- Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	100%	Target Tercapai	
		- Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Target Tercapai	
		- Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	674 Unit	100%	Target Tercapai	
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**93,50 Indeks**	**98,02 Indeks**	104,83 %	Target Terlampaui	
		Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	93,40 Persen	93,40 Persen	100%	Target Tercapai	
		- Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82 Indeks	82 Indeks	100%	Target Tercapai	

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2023 adalah 100% untuk realisasi fisik dan 47,06% untuk realisasi keuangan, maka terjadi efisiensi keuangan sebesar 52,94%. Tingginya nilai efisiensi anggaran merupakan dampak dari kebijakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Data efisiensi penggunaan sumberdaya diuraikan pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Data Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program, Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian%	
Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien								
Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	**Persentase Layanan Teknologi Informatika**	**91,00 Persen**	**91,00 Persen**	**100%**	**142,552,665,434.00**	**136,345,958,867.00**	**95.65%**	**4,35%**
	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	100 Persen	100	142,552,665,434.00	136,345,958,867.00	96%	4%
	Persentase informasi yang disebarluaskan	**93.40 persen**	**93.40 persen**	**100%**	**12,825,481,160.00**	**10,041,806,018.00**	**78%**	22%
	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	82.00 Indeks	100	12,825,481,160.00	10,041,806,018.00	78%	22%
	Nilai evaluasi manajemen kinerja	**82.75 Nilai**	**84.61 Nilai**	**102%**	**19,452,310,914.00**	**18,415,900,566.00**	**95%**	5%
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	100	29,676,300.00	21,369,350.00	72%	28%
	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	100	15,742,573,414.00	15,071,408,360.00	72%	28%

	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100	298,508,140.00	253,165,768.00	85%	15%
	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100	533,000,000.00	511,258,315.00	96%	4%
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	674 Unit	100	2,848,553,060.00	2,558,698,773.00	90%	10%
Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	**Indeks Pembangunan Statistik**	**4.00 nilai**	**3.37 nilai**	**84.25%**	**416,841,540.00**	**375,021,478.00**	**90%**	10%
	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor	11 Sektor	100	416,841,540.00	375,021,478.00	90%	10%
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	**Indeks Evalaksan**	**75.00 nilai**	**89.518 nilai**	**138%**	**466,431,780.00**	**413,891,736.00**	**89%**	11%
	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	29 OPD	100	337,809,940.00	290,403,962.00	86%	14%
	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD	29 OPD	100	128,621,840.00	123,487,774.00	72%	28%
Total Pagu Anggaran					**175,713,730,828.00**	**165,592,578,665.00**	**94.24%**	**5,76%**

3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
	MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN KRAMA BALI DAN WISATAWAN						
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	104,83%	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase informasi yang disebarluaskan	**100%**	**Menunjang**
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	**Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi**	**100%**	**Menunjang**
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi publik	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	100%	Menunjang
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	100%	Menunjang
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	100%	Menunjang
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3		7	8	9	10
	MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DARAT, LAUT DAN UDARA SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI						
2	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	134,38**%**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Layanan Teknologi Informatika	**100%**	Menunjang
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	**100%**	Menunjang
				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	Menunjang

				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Indeks Pembangunan Statistik**	**84,25%**	**Menunjang**
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi**	**100%**	**Menunjang**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis danDiseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	Menunjang
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Indeks Evalaksan**	**138%**	**Menunjang**

				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan InformasiPemerintah Daerah Provinsi	**Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan**	**100%**	**Menunjang**
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan AnalisisKebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100%	Menunjang
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun**	**100%**	**Menunjang**
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubungdalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**102,25%**	**Menunjang**

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia**	**100%**	**Menunjang**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasikinerja perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuanganyang tersedia**	**100%**	**Menunjang**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia**	**100%**	**Menunjang**

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	98,6%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**Menunjang**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantoryang disediakan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai**	**100%**	**Menunjang**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinasjabatan yang dipeliharadan dibayarkan pajaknya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ditunjang oleh beberapa program sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program pembangunan di Provinsi Bali serta meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Pimpinan dan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi. Capaian tahun 2024 sebesar 100% dari target, dengan nilai indeks 82,00 dari target sebesar 82,00.
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government, menjamin kesiapan operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government dan memperpanjang waktu penggunaan perangkat infrastruktur dan jaringan e-Government. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi/Aplikasi sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur melalui pemanfaatan sistem informasi. Indikator kinerja program adalah Persentase Layanan Teknologi Informasi dengan capaian tahun 2024 sebesar 100 persen dari target, dengan nilai yakni sebesar 91,0 persen dari target sebesar 91,0 persen.
c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini bertujuan untuk melakukan pencatatan data dan informasi yang terstruktur yang akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program ini menjadi dasar untuk melakukan penyusunan analisa statistik sektoral yang mencakup 11 sektor yaitu

sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM, yang akan dipublikasi secara luas. Indikator kinerja program adalah Indeks Pembangunan Statistik dengan capaian kinerja sebesar 84,25 persen dari target, dengan nilai yakni 3,37 dari target sebesar 4,00.

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan transaksi data dan informasi antar lembaga serta pelaksanaan kegiatan maupun administrasi perkantoran. Program ini memberikan standarisasi keamanan data, sehingga informasi pelaksanaan administrasi perkantoran bisa terlaksana secara lancar. Indikator kinerja program adalah Indeks Evalaksan dengan capaian kinerja sebesar 138 persen dari target, dengan nilai yakni 89,518 dari target sebesar 75,00.

3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali telah melaksanakan realisasi anggaran dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran telah berjalan secara efektif dan optimal guna mendukung tugas serta fungsi dinas dalam pelayanan komunikasi, informatika, dan statistik di wilayah Provinsi Bali.

Adapun capaian realisasi anggaran yang belum mencapai 100% bukan disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan akibat efisiensi belanja yang terjadi selama proses pengadaan. Dalam beberapa komponen belanja, harga yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan harga perkiraan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Efisiensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa mengurangi kualitas serta output dari program yang telah direncanakan.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mengelola anggaran secara optimal dan bertanggung jawab, memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik di Bali. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 3.11 Rincian Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**12,825,481,160.00**	**10,041,806,018.00**	**78%**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	12,825,481,160.00	10,041,806,018.00	78%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**142,552,665,434.00**	**136,345,958,867.00**	**95.65%**
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	142,552,665,434.00	136,345,958,867.00	95,65%
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19,452,310,914.00**	**18,415,900,566.00**	**95%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,676,300.00	21,369,350.00	72%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,742,573,414.00	15,071,408,360.00	72%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298,508,140.00	253,165,768.00	85%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533,000,000.00	511,258,315.00	96%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,848,553,060.00	2,558,698,773.00	90%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**416,841,540.00**	**375,021,478.00**	**90%**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	416,841,540.00	375,021,478.00	90%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**466,431,780.00**	**413,891,736.00**	**89%**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	337,809,940.00	290,403,962.00	86%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	128,621,840.00	123,487,774.00	72%
	TOTAL	**175,713,730,828.00**	**165,592,578,665.00**	**94.24%**

BAB IV
PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 memiliki peran sebagai alat kendali dalam upaya pengelolaan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta menjadi instrumen utama untukmemonitor dan mengevaluasi capaian kinerja serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali tahun 2024 dengan kualitas pelaksanaan baik dan perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebihbaik hingga tahun-tahun berikutnya.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Tahun 2024 sesuai tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah berhasil, hal tersebut tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

4.2 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

1. Kondisi Pusat Data/Data Center Provinsi Bali saat ini belum memenuhi Standar Tier III dan belum adanya Pusat Data Cadangan/*disaster recovery center* dan *command center*;
2. Struktur Topologi jaringan lokal di setiap perangkat daerah yang belum optimal dan terstruktur serta belum adanya manajemen *bandwidth* di masing-masing Perangkat Daerah;

3. Penyelenggaraan dalam setiap aspek SPBE belum termuat sepenuhnya dalam dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
4. Kualitas SDM bidang IT masih relatif rendah dan kurangnya tenaga sandiman serta minimnya Alat Pendukung Utama (APU) persandian menyebabkan pelayanan dibidang IT dan keamanan informasi belum maksimal.
5. Sulitnya menyusun jadwal peliputan akibat padatnya kegiatan pimpinan baik volume dan waktu;
6. Minimnya masyarakat dalam mencari sebuah informasi publik mengindikasikan bahwa keberadaan PPID Provinsi Bali masih belum dikenal masyarakat secara luas.
7. Belum terbentuknya PPID Komisi Informasi Provinsi Bali yang diakibatkan belum ditunjuknya secara definitif Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Bali
8. Dalam rangka pembangunan Taman Teknologi "Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali", masih terdapat beberapa lahan di area pembangunan yang perlu dibebaskan guna mendukung konstruksi serta adanya faktor cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan *supply* material.

Upaya Penyelesaian:

1. Melakukan Standarisasi dan *Assessment* Topologi Jaringan Intranet di setiap perangkat daerah;
2. Melakukan Perluasan dan Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik;
3. Dalam rangka digitalisasi birokrasi dan efisiensi, maka perangkat daerah diarahkan menggunakan layanan cloud server dengan demikian pengadaan server baru tidak ada di masing-masing perangkat daerah dan selanjutnya terpusat menggunakan layanan cloud server. Untuk lebih memaksimalkan layanan pusat

data, dilakukan pemeliharaan dan peremajaan peralatan jaringan pada Pusat Data;

4. Melakukan rekruitmen tenaga IT dan Mengusulkan pelatihan /bimtek SDM bidang IT serta bimtek tenaga sandiman;
5. Melakukan sosialisasi secara lebih luas ke masyarakat terkait peranan PPID dan melakukan bimbingan teknis PPID;
6. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara lebih intens dengan pemilik lahan agar proses pembebasan lahan lebih cepat terselesaikan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pekerjaan pembangunan Taman Teknologi "Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali" agar dapat selesai sesuai target.

4.3 Saran Dan Rekomendasi

Saran:

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian memiliki peranan strategis dalam mendukung mewujudkan visi Kepala Daerah khususnya dukungan teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk itu program-program bidang Komunikasi dan informasi perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal

Rekomendasi:

Agar peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara online dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat menjadi rujukan bagi OPD kabupaten/kota;
- Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai;
- Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun di kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada periode mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada periode mendatang.